

**PERANAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 14 TAHUN 2009**

(Studi kasus : Dipelantar I, Pelantar II dan Pelantar III)

SABIRIN

Email: irinibrahim227@gmail.com

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi, baik oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju di dunia. Masalah sampah merupakan masalah yang umum dan telah menjadi fenomena universal di berbagai negara belahan dunia manapun, dengan titik perbedaannya terletak pada seberapa banyak sampah yang dihasilkan. Salah satunya di negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 30 provinsi dan kurang lebih 500 kota/kabupaten. Negara yang hampir 70% nya merupakan daerah lautan, tetapi permasalahannya daerah laut yang dimiliki oleh Indonesia sudah mulai tercemar oleh sampah.

Tujuan dari penelitian memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemikiran serta dapat membantu sebagai bahan informasi mengenai Peranan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2009 (Studi Kasus : Dipelantar I, Pelantar II dan Pelantar III). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan di dalam penelitian ini berjumlah 6 informan, pemilihan informan dengan teknik *purposive sampling*.

Dari hasil penelitian ditemui bagaimana Pemerintah sebagai Regulator yaitu sebagai penentu Kebijakan pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang dapat menjadi patokan dalam meningkatkan atau mengoptimalkan pengelolaan penertiban pembuangan sampah di daerah Pelantar I, II dan III dengan hasil penelitian masih kurang. Pemerintah sebagai Dinamisator yaitu mengupayakan Efisiensi dan Peningkatan Layanan dalam mengupayakan efisiensi dan peningkatan pelayanan belum maksimal dan masih jauh dari harapan yang diinginkan, hal ini disebabkan karena penumpukan sampah di Pelantar I, II dan III karena minimnya tempat pembuangan sampah dan jauhnya Tempat Pembuangan Akhir sampah dari daerah

tersebut sebagai ketentuan untuk mengefesiensikan lahan selain itu, pengadaan fasilitas maupun perbaikan fasilitas yang ada di Pelantar I, II dan III kurang diperhatikan. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam penyediaan tempat pembuangan sampah serta pengangkutan sampah di Pelantar I, II dan III yaitu: Pemerintah sebagai penyedia lahan. perlunya penambahan lahan pembuangan sampah untuk membuang segala bentuk sampah dari pelantar I, II dan III. Pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah telah memfasilitasi TPA tetapi sangat jauh dengan daerah pelantar I, II dan III untuk itu perlunya pelayanan pemerintah untuk menyediakan lahan atau mengatasi kendala tersebut.

Kata Kunci :*Pengelolaan, Sampah, Pemerintah*

PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi, baik oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju di dunia. Masalah sampah merupakan masalah yang umum dan telah menjadi fenomena universal di berbagai negara belahan dunia manapun, dengan titik perbedaannya terletak pada seberapa banyak sampah yang dihasilkan. Salah satunya di negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 30 provinsi dan kurang lebih 500 kota/kabupaten. Negara yang hampir 70% nya merupakan daerah lautan, tetapi permasalahannya daerah laut yang dimiliki oleh Indonesia sudah mulai tercemar oleh sampah.

Sampah di laut Indonesia diakibatkan oleh beberapa faktor. Secara jelas, bahwa faktor pertama adalah konstelasi sebaran penduduk yang sebagian besar berada pada tepian badan air seperti sungai dan laut. Hal ini juga diperparah dengan paradigma masyarakat, “laut masih bisa dianggap dapat mengelola sampah”. Pencemaran sampah di laut terdapat mulai dari garis pantai, pesisir, dan laut dalam. Dan itu

merupakan ancaman terhadap kelestarian laut dan biotanya. Dampak pertumbuhan penduduk juga menambah beban penambahan sampah dari waktu ke waktu.

Melihat potensi permasalahan dikemudian hari, maka upaya meminimalisir volume timbunan sampah dan pemanfaatan sampah cukup diperlukan. Di perkotaan misalnya Sampah perkotaan merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius. Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan yang pesat berdampak terhadap peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Peningkatan jumlah sampah yang tidak diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks, antara lain sampah tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah liar.

Berdasarkan kondisi tersebut beserta masalah yang dihadapi itu dalam upaya menciptakan wilayah Kota Tanjungpinang yang bersih dan nyaman dan juga untuk meneliti lebih jauh terhadap peranan pemerintah Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan sampah, dengan ini peneliti tuangkan dalam usulan penelitian yang berjudul **“PERANAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 14 TAHUN 2009”**.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan

interpretasi terhadap gejala yang diamat, serta utuh (*Holistic*) karena setiap aspek dari obyek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang berasal dari informan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Pelantar I, II dan III dan lokasi ini dapat membantu peneliti untuk menyelesaikan rumusan masalah yang peneliti rumuskan.

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer adalah suatu objek atau dokumen original-material mentah dari pelaku yang disebut *first-hand information*. (ulber silalahi,2009:289). Data yang diperoleh langsung dari informan baik melalui observasi maupun wawancara.

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain maupun lewat dokumen (Sugiyono, 2012: 225).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Nukmawati untuk mengetahui peranan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dalam Mengatasi sampah di Pelantar yaitu sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Jika dilihat dari hasil wawancara peneliti, menunjukkan bahwa untuk tercapainya tempat yang bersih harus disediakan lahan untuk pembuangan sampah, kemudian membentuk seperti taman hal ini diungkapkan oleh penjaga kebersihan, menurut informan bahwa salah satu solusi tentang penyediaan lahan dengan mengatur penempatan-penempatan blok-blok pada area pelantar I pada solusi yang diberikan pada pengelola lahan ini apakah efektif atau tidak.

Jalan yang paling baik adalah dengan melakukan perluasan lahan untuk tempat pembuangan sampah. Dari pernyataan ini penjaga kebersihan berpikir bahwa menumpuk sampah merupakan salah satu solusi yang tepat bagi mereka dikarenakan kurangnya ketersediaan lahan pada pelantar I, II dan III yang merupakan tempat yang sangat dekat dengan pasar, mungkin ini bisa menjadi suatu solusi yang tepat jika pemerintah tidak mampu mengambil langkah yang secara cepat dan tepat guna dalam permasalahan ini.

Berdasarkan wawancara dari informan yang peneliti wawancarai bahwa peran pemerintah sebagai regulator belum efektif dalam pembentukan kebijakan dalam mengatasi pengelolaan sampah.

2. Pemerintah sebagai Dinamisator

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap peran pemerintah sebagai dinamisator belum berjalan dengan baik, pemerintah telah memberikan

bimbingan, pengarahan terhadap sikap yang harus dilakukan jika mengalami masalah di TKP, sedangkan tindakan pemerintah itu sendiri untuk membuat sebuah penegasan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke laut masih belum ada.

3. Pemerintah sebagai Fasilitator

4. Dari hasil wawancara peneliti menunjukkan pemerintah sebagai fasilitator dengan memberikannya layanan kepada masyarakat berupa penyediaan alat angkutan dan berupa peralatan-peralatan yang lainnya yang digunakan dalam proses pengelolaan sampah, pemerintah sebagai fasilitator harus berperan aktif dalam memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat yang membutuhkan dalam hal ini tentang pelayanan pada penyediaan lahan TPS di pelantar I, II dan III.
5. Dapat kita lihat bahwa peran pemerintah dalam hal ini sebagai pelayanan masyarakat dimana lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan pelanggan (masyarakat), kaitannya dengan penyediaan lahan pembuangan sampah di Kota Tanjungpinang pemerintah yang sebagai fasilitator wajib memberikan layanan yang penuh sesuai dengan standar yang dibutuhkan pada masyarakatnya. Dari hasil wawancara peneliti menunjukan satu kesamaan antara hasil wawancara kepada Staff Pengawasan bahwa pihak pemerintah memberikan layanan dengan memeberikan layanan berupa fasilitas angkutan sampah bagi penjaga kebersihan, secara kesimpulan dapat simpulkan bahwa hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah

memberikan pelayanan bagi masyarakatnya terkait dengan pengurusan pengelolaan sampah, kita tau bahwa dalam rangka pembangunan nasional, peran pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas umum pembangunan melainkan yaitu mengarahkan, menggerakkan dan mengendalikan pembangunan secara lancar, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah:

1. Pemerintah sebagai Regulator yaitu sebagai penentu Kebijakan pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang dapat menjadi patokan dalam meningkatkan atau mengoptimalkan pengelolaan penertiban pembuangan sampah di daerah Pelantar I, II dan III dengan hasil penelitian masih kurang.
2. Pemerintah sebagai Dinamisator yaitu mengupayakan Efisiensi dan Peningkatan Layanan dalam mengupayakan efisiensi dan peningkatan pelayanan belum maksimal dan masih jauh dari harapan yang diinginkan, hal ini disebabkan karena penumpukan sampah di Pelantar I, II dan III karena minimnya tempat pembuangan sampah dan jauhnya Tempat Pembuangan Akhir sampah dari daerah tersebut sebagai ketetapan untuk mengefesiengkan lahan selain itu, pengadaan fasilitas maupun perbaikan fasilitas yang ada di Pelantar I, II dan III kurang diperhatikan.

3. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam penyediaan tempat pembuangan sampah serta pengangkutan sampah di Pelantar I, II dan III yaitu:

- 1) Pemerintah sebagai penyedia lahan. perlunya penambahan lahan pembuangan sampah untuk membuang segala bentuk sampah dari pelantar I, II dan III.
- 2) Pelayan pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah telah memfasilitasi TPA maupun TPS tetapi sangat jauh dengan daerah pelantar I, II dan III untuk itu perlunya pelayanan pemerintah untuk menyediakan lahan atau mengatasi kendala tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan pada penelitian ini terkait kendalakendala yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang sehingga penyelesaian permasalahan sampah belum berjalan maksimal yaitu :

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang harus lebih sering melakukan sosialisasi dengan Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang agar masyarakat semakin peduli terhadap kebersihan di kawasan Pelantar I, II dan III.

1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang harus lebih sering melakukan sosialisasi tentang

pentingnya kepedulian masyarakat akan kebersihan lingkungan dengan Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang agar masyarakat semakin peduli terhadap kebersihan di kawasan Pelantar. Sosialisasi yang dilakukan harus berjalan secara terus menerus dan berkelanjutan agar pengetahuan tentang pentingnya menjaga kawasan Pelantar I, II dan III ini dijalankan secara maksimal oleh masyarakat yang ada di Kawasa.

2. Penambahan fasilitas untuk pengangkutan sampah. Untuk pengambilan sampah yang berada di gang-gang kecil seharusnya diangkut menggunakan kaisar dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang. Disediakan tong-tong sampah yang diletakan di kawasan pasar tradisional, sehingga penjual maupun pembeli dapat membuang sampah atau limbahnya ke tong-tong yang telah disediakan.
3. Meningkatkan tim pengawasan yang bertugas mengawasi kebersihan yang ada di Pelantar I, II dan III. Tim pengawasan ini merupakan tim yang dibentuk oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang yang bertugas sebagai koordinator pembersihan kawasan Pelantar. Tim pengawas selanjutnya merupakan tim pengawas yang ditunjuk setiap RW dan RT yang bertugas mengawasi wilayahnya masing-masing. Tim pengawas RT dan RW nantinya wajib melaporkan kepada tim pengawas dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang terkait pengawasan yang telah dilakukan dan hasil dari pengawasan serta jumlah volume sampah setiap hari diwilayah RT dan RW nya masing-masing.

4. Menjadikan kawasan Pelantar sebagai kawasan Rutin pembersihan dan gotong royong. Pembersihan ini harus dilaksanakan 2 minggu sekali dalam 1 bulan. Karena Pelantar merupakan kawasan yang memiliki jumlah sampah sangat banyak maka pembersihan tidak dapat dilakukan hanya dengan gotong royong namun juga dengan pembersihan rutin seperti di beberapa tempat yang menjadi ikon Tanjungpinang.
5. Menjalinkan komunikasi yang lebih erat dengan masyarakat agar setiap gotong royong yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang masyarakat dapat ikut berkontribusi membersihkan lingkungan tempat tinggalnya. Komunikasi ini bisa dilaksanakan oleh tim pengawasan yang bertugas mengawasi kebersihan di kawasan Pelantar yang dibentuk oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dan Ketua RT di Kawasan Pelantar I, II dan III.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Arikunto, Suharsimi. 2013, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta
- Athoillah, Anton. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- A.Black, James dan Dean J.Champion. 2009, *Metode & Masalah Penelitian Sosial*,
Bandung : PT Refika Aditama.
- Handyaningrat,Soewarno. 1989. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Haji Masag
- Handoko, T. Hani. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung : Salemba Empat.
- Thoha, Miftah, 2010 *Kepemimpinan dalam manajemen*. Jakarta: T. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* 1. Rineka Cipta, Jakarta.

Silalahi, Ulber. 2012, *Metodelogi Penelitian Sosial, Bandung* : PT Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono. , 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sugiyono, Agustus. 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : CV ALFABETA

Westra, Pariata, 1983, *Manajemen Pembangunan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah

DATA

<http://batam.tribunnews.com/2017/04/07/24-kubik-sampah-laut-tanjungpinang-diangkut-ke-tpa-itu-sudah-banyak-pak-wali>

<http://www.posmetro.co/read/2016/03/18/497/Tanjungpinang-dan-Sampah-Laut>

<http://jurnalkepri.com/2017/04/03/gubernur-nurdin-laut-tanjungpinang-banyak-sampah/>

